

## Perubahan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Oleh: M. Zainuddin\*

### Abstrak

*Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok atau elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, perubahan sosial diarahkan kepada proses pendewasaan elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam masyarakat, salah satunya melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan wahana yang paling efektif untuk proses perubahan sosial (sebagai agent of change).*

Kata kunci: perubahan sosial, desentralisasi, sosiologi pendidikan

### A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Proses menunjukkan adanya aktifitas dalam bentuk tindakan aktif di mana terjadi suatu interaksi yang dinamis dan dilakukan secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena tindakan pendidikan selalu bersifat aktif dan terencana, maka pendidikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu pemanusiaan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin dan berakhlak mulia.

Pendidikan sebagai suatu lembaga tidak langsung menghasilkan produk tetapi terjadi melalui usaha pemberian jasa baik oleh tenaga pengajar, administrasi maupun pengelola. Output pendidikan bukan barang yang dapat dikonsumsi bersamaan dengan waktu dihasilkan, bukan sesuatu yang berwujud. Berbagai definisi diberikan tentang jasa pelayanan, salah satu di antaranya mengatakan bahwa usaha pelayanan jasa adalah suatu perbuatan orang/kelompok menawarkan kepada orang lain/kelompok, sesuatu yang tidak berwujud, produknya berkaitan atau tidak dengan fisik produk. Karena itulah dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa, sehingga

---

\*M. Zainuddin adalah dosen KSDP pada FIP Universitas Negeri Malang.

perlu memperhatikan aspek-aspek pembiayaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara khusus, pendidikan dapat dipastikan selalu berhubungan dengan perkembangan dan perubahan perilaku anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek tingkah laku lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola tingkah laku manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Pada hakikatnya, perilaku manusia hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang dipelajari oleh individu merupakan hasil hubungan antara individu itu dengan pihak lain di lingkungan sekitarnya, baik di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Demikian juga kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya melalui pendidikan. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada generasi mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tingkah laku lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap orang. Setiap masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan itu dapat diartikan sebagai sosialisasi.<sup>1</sup>

Dalam arti ini pendidikan dimulai dengan interaksi pertama individu itu dengan anggota masyarakat lainnya, misalnya pada saat pertama kali bayi dibiasakan minum menurut waktu tertentu. Dalam definisi ini tidak diadakan perbedaan antara orang tua dengan anak, antara pendidik dengan anak didik, tetapi yang diutamakan ialah adanya hubungan yang erat antara individu dengan masyarakat. Belajar merupakan sosialisasi yang terus menerus (kontinyu). Setiap individu dapat menjadi anak didik dan menjadi pendidik. Individu belajar di lingkungan sosialnya dan juga sekaligus mengajar dan mempengaruhi orang lain.

Dalam masyarakat primitif misalnya, tidak ada pendidikan formal yang tersendiri. Setiap anak harus belajar dari lingkungan sosialnya dan harus menguasai sejumlah perilaku yang diharapkan daripadanya pada saatnya, tanpa adanya pendidik (guru) tertentu yang bertanggung jawab atas perilakunya. Demikian juga dalam masyarakat yang maju, kebanyakan kebiasaan dan pola perilaku yang pokok dalam kebudayaan dipelajari melalui proses pendidikan atau sosialisasi informal. Bahasa, kebiasaan, makan, dan kepribadian fundamental sebagian besar diperoleh melalui pendidikan tidak formal.

---

<sup>1</sup>S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), p. 10.

Namun sering pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal di sekolah, orang yang berpendidikan adalah orang yang telah bersekolah. Bila dalam mengisi formulir ditanyakan tentang pendidikan seseorang misalnya, maka yang dimaksud adalah sekolah-sekolah yang telah ditempuhnya. Sistem pendidikan, yakni sekolah<sup>2</sup> adalah lembaga sosial yang ikut serta menyumbang dalam proses sosialisasi individu agar menjadi anggota masyarakat seperti yang diharapkan. Sekolah pada akhirnya selalu berhubungan dengan dan tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat.

Dengan kata lain, melalui pendidikan terbentuklah kepribadian seseorang, sehingga dapat dikatakan hampir seluruh perilaku atau tingkah laku individu berhubungan erat dengan atau dipengaruhi oleh orang lain. Maka karena itu kepribadian pada hakekatnya merupakan gejala sosial. Aspek-aspek yang sama yang terdapat dalam perilaku semua orang dalam masyarakat dapat disebut kebudayaan masyarakat itu. Kepribadian individu selalu bertalian erat dengan kebudayaan lingkungan tempat di mana ia hidup.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut di atas, sebenarnya ada banyak konsep tentang perubahan sosial yang dapat digunakan untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Perubahan interaksi sosial dalam masyarakat dapat terjadi karena adanya perubahan dalam sifat pemerintahan, dari yang otoriter menjadi demokratis; atau karena bergesernya paradigma yang dianut pemerintah, dari yang sentralistik dan menonjolkan keseragaman menjadi desentralistik dan mengutamakan keberagaman. Perubahan interaksi sosial tersebut bisa jadi karena adanya desentralisasi, sebab dengan desentralisasi ini dimungkinkan menjadi lebih luas ruang-ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membahas masalah-masalah kepublikannya. Dengan kata lain, ikut berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi dan partisipasi ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sekolah telah “dengan sengaja diciptakan” dalam arti bahwa pada saat tertentu telah diambil suatu keputusan untuk mendirikan sebuah sekolah guna memudahkan pengajaran sejumlah mata pelajaran yang sangat beraneka ragam; dan ia merupakan contoh dari suatu organisasi formal. Lihat Philip Robison, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, alih bahasa Hasan Basari, (Jakarta: Rajawali, 1986), pp. 237-238.

<sup>3</sup> Nanang Rijono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan; Kajian Fenomenologis Makna Partisipasi Bagi Masyarakat Etnis Kutai di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara”, (Malang: Unmer, 2003), p. 17.

## B. Konsep Perubahan Sosial

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang membahas mengenai berbagai gejala yang timbul dalam masyarakat. Dengan demikian sosiologi sangat erat kaitannya dengan pembahasan tentang perubahan sosial. Di mana perubahan sosial adalah suatu perubahan dari kondisi tertentu dalam suatu masyarakat. Konsep perubahan sosial akan sangat penting digunakan untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai aksi interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Persoalan-persoalan mengenai pembatasan atas pengertian perubahan sosial telah banyak dibahas oleh para sosiolog. Untuk menghindari kekaburan dalam pemahaman, maka pembicaraan mengenai perubahan sosial bisa dikembalikan kepada beberapa pendapat yang sebelumnya sudah dikemukakan para sosiolog terkemuka. Dari terminologi yang dimunculkan tersebut, akan dapat dikemukakan apa sesungguhnya perubahan sosial, dan dalam konteks apa perubahan sosial itu dibicarakan.

William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.<sup>5</sup> Bila dikaitkan dengan tema dalam kajian ini, maka perubahan sosial yang dimaksud adalah adanya pergeseran atau perubahan sistem pendidikan, dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat sentralistik menuju pendidikan yang bersifat desentralistik. Termasuk juga dalam hal ini adalah adanya perubahan biaya pendidikan, yang semula dipandang sebagai pendidikan dengan biaya murah menjadi biaya pendidikan yang tinggi, yang menyebabkan tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan.

Soerjono Soekanto mengutip pendapatnya Gillin dan Gillin serta Samuel Koenig. Di mana menurut Gillin dan Gillin bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan menurut Samuel Koenig, perubahan sosial

---

<sup>4</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), pp. 3-5.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), pp. 335-336.

menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi itu terjadi karena berbagai sebab, baik sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.<sup>6</sup>

Sedangkan Talcott Parsons, sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa proses kelangsungan informasi dan energi antara pelbagai sistem aksi memberikan peluang bagi terjadinya perubahan di dalam sistem aksi atau pada hubungan antara pelbagai sistem aksi tersebut. Salah satu sumber perubahan itu adalah akses informasi.<sup>7</sup> Misalnya akses motivasi (energi mempunyai akibat bagi penetapan peranan-peranan, reorganisasi perangkat peranan, struktur normatif, dan orientasi nilai kebudayaan). Sumber lainnya adalah karena kurangnya informasi dan energi, yang menyebabkan terjadinya penyesuaian kembali baik secara eksternal maupun internal.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto mengutip pendapat Selo Soemardjan, bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tekanan yang terdapat pada definisi ini adalah pada lembaga-lembaga masyarakat sebagai himpunan pokok manusia, di mana perubahan tersebut dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya sendiri.

Riyadi Soeprapto menyatakan bahwa suatu perubahan dalam masyarakat bisa terjadi pada nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan kelembagaan kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat (stratifikasi sosial), kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya.<sup>9</sup> Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Di mana pengaruh dari perubahan itu bisa meluas dengan cepat ke berbagai negara di belahan dunia ini. Hal ini tidak lain, karena disebabkan oleh faktor teknologi komunikasi yang semakin canggih.

Dalam hal ini para sosiolog pada umumnya meyakini bahwa perubahan sosial adalah gejala sosial yang sangat wajar dan merupakan ciri utama masyarakat, di mana masyarakat yang dinamis adalah masyarakat yang terus bergerak dalam rangka menemukan sesuatu yang baru. Sebagai gejala yang wajar, maka hampir tidak ada masyarakat yang tidak berubah.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 337.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Seri Pengenalan Sosiologi 4, Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p. 53.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> H.R. Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar dan Averoes Press Malang, 2001), p. 5.

Masyarakat yang mengalami intensitas perubahan sosial merupakan masyarakat yang memiliki dinamika interaksi sosial yang cukup tinggi, dan demikian pula sebaliknya.<sup>10</sup>

Sebagian sosiolog menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis atau kebudayaan. Selain itu, juga ada yang berpendapat bahwa perubahan sosial bersifat periodik dan non periodik.<sup>11</sup>

Sedangkan Pitirim A Sorokin (dalam Soeprapto) seorang sosiolog yang masyhur, menyatakan bahwa segenap usaha untuk mengemukakan bahwa ada suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil dengan baik. Sorokin meragukan adanya lingkaran perubahan-perubahan sosial tersebut, namun demikian dia tidak menolak bahwa perubahan sosial tetap harus terjadi, sehingga berbagai gejala sosial yang ada itu tetap layak untuk dipelajari.<sup>12</sup>

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan-perubahan baik perubahan dalam arti luas maupun perubahan dalam arti yang sempit, perubahan secara cepat (revolusi) atau perubahan secara lambat (evolusi). Pada prinsipnya perubahan dalam masyarakat merupakan proses yang terus menerus. Di dalam masyarakat maju dan berkembang, perubahan sosial dan kebudayaan selalu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Spott (dalam Faisal), perubahan sosial (*social change*) adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jika dilihat dari segi penyebabnya, perubahan sosial meliputi perubahan yang datangnya dari luar (*exogenous change*) dan perubahan dari dalam (*endogenous change*). Sedangkan menurut tingkat kemungkinan diperkirakannya terdapat perubahan episodik (*episodic change*) dan perubahan terpola (*pattern change*).<sup>13</sup> Atau lebih lanjut dari segi sifatnya, perubahan sosial dapat bersifat perubahan yang tidak direncanakan dan perubahan yang direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki, yang biasanya dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan (*agent of change*) tersebut. Perubahan yang direncanakan ini bisa berupa perubahan yang ditentukan berasal dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*).

---

<sup>10</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, pp. 4-13.

<sup>11</sup> *Ibid.*, pp. 5-9.

<sup>12</sup> H.R. Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik*, p. 5.

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, t.t.), p. 89.

Menurut Marx, karena di Benua Asia pemilik alat-alat produksi adalah pemerintah setempat (*local government*), maka perubahan sosial yang terjadi di Asia selalu datang dari para elit penguasa, dan tumbuh kuat 'patron-klien'. Situasi ini terbina sejak zaman feodalisme (Lauer, 1993). Sehingga perubahan sosial di Asia, termasuk di Indonesia, pada umumnya digagas oleh pemerintah yang levelnya lebih tinggi (bersifat *top-down*).

Sedangkan menurut Himer dan More (dalam Soelaiman) ada tiga dimensi perubahan sosial, yaitu dimensi struktural, kultural dan dimensi interaksional. Dimensi struktural dari perubahan sosial mengacu pada perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, yang menyangkut perubahan peran, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan perubahan dalam lembaga sosial.<sup>14</sup> Perubahan sosial dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (*discovery*) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Perubahan sosial dalam dimensi interaksional mengacu kepada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat, yang berkenaan dengan perubahan dalam frekuensi, jarak sosial, saluran, aturan-aturan atau pola-pola, dan bentuk hubungan.

Perubahan sosial dalam masyarakat, misalnya tampak dari perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, kemudian menjadi masyarakat pascamodern. Perubahan-perubahan masyarakat tersebut terkait dengan rasionalisasi yang memacu timbulnya industrialisasi dan birokratisasi pada abad ke-19, dan berkembang secara penuh pada abad ke-20. Menurut Bogason (2001) rasionalisasi dengan industrialisasi dan birokratisasi ini memiliki tiga implikasi bagi tindakan sosial, yaitu spesialisasi, sentralisasi dan formalisasi.

Menurut Bogason, pada tahun 1960-an muncullah berbagai gerakan yang membawa kepada kondisi pascamodern. Ia mengatakan bahwa "*Postmodern conditions are negating the measures of integration of modernity – but not in the same sense of returning to what was before modern times*".<sup>15</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa kondisi pascamodern ini didasarkan pada tiga ciri fragmentasi (*fragmentation*) atau disagregasi (*disaggregation*), yaitu individualisme, internasionalisasi dan segmentasi organisasional. Segmentasi organisasional memiliki dua aspek, yaitu segmentasi horizontal dan desentralisasi.

---

<sup>14</sup> M. Munandar Soelaiman, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arab Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), pp. 115-121.

<sup>15</sup> Peter Bogason, *Public Policy and Local Governance, Institution in Postmodern Society*, (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2001), pp. 19-23.

Bogason membuat ringkasan ciri-ciri masyarakat modern (*modern rationalization*) dan masyarakat pascamodern (*postmodern reasoning*) sebagai berikut:<sup>16</sup>

Tabel 1: Modern Society and Postmodern Conditions

MODERN RATIONALIZATION	POSTMODERN REASONING
Global visions	Particular interests
Production	Consumption
Basic needs	Quality of life
Condition of work	Leisure time
Mass production	Flexible specialization
Production society	Information society
Class society	Pluralistic society
Integration	Differentiation
National culture	International images
National state	International regimes
Party politics	Personality politics
Politics of consensus	Politics of persuasions
Planning	Spontaneity
Interest organizations	Social movements
Centralization	Decentralization
Wholes	Fragments

Sumber: Peter Bogason

Dalam menganalisis perubahan sosial, R.P. Applebaum (1971) membuat klasifikasi perubahan sosial dan teori perubahan sosial (*Theories of Social Change*) yang dapat digunakan untuk mempelajarinya, sebagai berikut:

Tabel 2: Klasifikasi Perubahan Sosial Menurut Applebaum

SOSIAL: Asumsi yang berkaitan dengan stabilitas yang melekat pada organisasi sosial
---

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 24.



PERUBAHAN: Perubahan secara langsung	Stabilitas yang melekat, perhatian yang kecil untuk perubahan	Stabilitas yang melekat, tetapi seolah-olah perubahan yang secara perlahan-lahan	Stabilitas yang tidak melekat, perubahan kecil diberikan untuk stabilitas
YA: Fokus teori ini adalah keseragaman perubahan secara langsung	TEORI EQUILIBRIUM	TEORI EVALUASI	TEORI KONFLIK
TIDAK: Fokus teori ini kurang seragam terhadap perubahan secara langsung	TEORI NAIK DAN TURUN (SPENGLER, SOROKIN) (WEBER)		

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perubahan pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, dapat ditinjau dengan teori-teori perubahan sosial tersebut. Bagi penganut teori konflik, desentralisasi pemerintahan dapat menimbulkan konflik dari berbagai pihak, misalnya antara penguasa dan rakyat, atau antara berbagai kelompok kepentingan, sehingga dapat menimbulkan instabilitas.

### C. Desentralisasi Sebagai Bentuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial juga terjadi dalam pemerintahan, dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini membawa beberapa konsekuensi. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan desentralisasi.

Menurut Fantini and Gittel (1973), istilah desentralisasi (*decentralization*) merupakan istilah yang mendua (*ambiguous*), karena dapat diartikan berbeda oleh orang yang berbeda.<sup>17</sup> Menurut Mowhood (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Agrawal dan Ribot, desentralisasi diartikan “sebagai tindakan pemerintah pusat secara formal menyerahkan kekuasaan

<sup>17</sup> Andrew R. Freeman, *The Network Nation —The Relevance of This For Possible Education and General Administrative Structure and Strategies in the 1980s— And 90s*, Master of Education Minor Thesis, University of Melbourne, 1983. [afreeman@pcug.org.au](mailto:afreeman@pcug.org.au), updated 28 August 1996, p. 17.

kepada aktor dan lembaga pada level yang lebih rendah dalam suatu administratif-politis dan hirarki teritorial”.<sup>18</sup>

Menurut Victoria sebagaimana yang dikutip oleh Freeman, “Desentralisasi dalam konteks organisasi berkenaan dengan pemindahan kekuasaan jauh dari pusat organisasi ke bagian organisasi yang lain”.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Manor, ada tiga sektor atau elemen desentralisasi yang diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi yaitu *democratic, fiscal, and administrative*, atau menurut Biswanger *political, fiscal and administrative* yang ketiganya harus diimplementasikan secara serempak.<sup>20</sup>

Dengan menyitir pendapatnya Cooper, Abdul Wahab mengatakan desentralisasi apapun bentuknya mengandung makna adanya upaya sistematis untuk semakin mendekatkan pelayanan publik pada rakyat, *moving the governing function closer to the community*.<sup>21</sup> Sejalan dengan Cooper, Anwar Shah mengatakan bahwa desentralisasi dapat memperkuat partisipasi masyarakat dengan membawa pemerintah dekat dengan rakyatnya (*decentralization strengthens citizen participation by bringing governments closer to the people they are intended to serve*).<sup>22</sup>

Sedangkan Agrawal dan Ribot sendiri mengemukakan bahwa ada tiga dimensi yang berbeda yang mendasari seluruh tindakan desentralisasi, yaitu: *actors, powers, and accountability*. Lebih lanjut dikatakan: “*Without understanding of powers of various actors, the domains in which they exercise their power, and to whom and how they are accountable, it is impossible to learn the extent to which meaningful decentralization has taken place*”.<sup>23</sup>

Namun perlu diingat bahwa desentralisasi bukanlah semacam ‘obat mujarab’ yang dapat menyembuhkan banyak hal atau mengubah segalanya dengan cepat seperti lampu Aladin.<sup>24</sup> Kita perlu waspada karena ada beberapa ancaman desentralisasi (*the danger of decentralization*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Prud’homme dan Tanzi yaitu “... *macro*

<sup>18</sup> Arun Agrawal and Jesse Ribot, *Accountability in Decentralization, A Framework with South Asian and West African Cases*, (Yale University: Departemen of Political Science, 2000), p. 3.

<sup>19</sup> Andrew R. Freeman, *The Network Nation*, p. 11.

<sup>20</sup> Arun Agrawal dan Jesse Ribot, *Accountability in Decentralization*, pp. 4-5.

<sup>21</sup> Abdul Wahab, Solichin, Fadillah Putra dan Saiful Arif, *Masa Depan Otonomi Daerah, Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), p. 8.

<sup>22</sup> Anwar Shah, *Balances, Accountability and Responsiveness: Lessons about Decentralization*, (Washington D.C., USA: World Bank, 1999), p. 21.

<sup>23</sup> Arun Agrawal dan Jesse Ribot, *Accountability in Decentralization*, p. 5.

<sup>24</sup> Abdul Wahab, dkk, *Masa Depan*.

*mismanagement, corruption, red tape, and widening gulf between rich and poor persons regions under decentralized fiscal system ...*”<sup>25</sup>

Perubahan dalam sistem pemerintahan daerah ini—dari sistem yang sentralistik ke sistem yang desentralistik—akan mempengaruhi pola dan mekanisme pemerintahan dan pembangunan daerah. Pola yang pada awalnya *top-down* diganti dengan pola *bottom-up*. Pola dan mekanisme seperti ini akan mempengaruhi aktivitas manajemen dunia usaha. Apalagi penerapan konsep otonomi daerah ini masih diliputi beberapa masalah dalam implementasinya.

Menurut Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab mengemukakan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai patologi, yaitu: pertama, adanya inkoordinasi, yaitu suatu kondisi di mana para bupati/walikota tidak mau dikoordinasi oleh gubernur. Kedua, adanya (sikap) DPRD yang sangat arogan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ketiga, munculnya daerahisme; keempat, adanya pemisahan teritori yang berlebihan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kelima, disinyalir bahwa pemerintah daerah cenderung melakukan eksploitasi membabi-buta terhadap sumber daya alam yang ada di daerah.<sup>26</sup>

#### **D. Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan**

Fungsi sosiologik pendidikan pada dasarnya adalah sebagai proses penerus nilai-nilai kebudayaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, atau yang disebut sebagai proses sosialisasi. Pendidikan dianggap sebagai wahana yang paling efektif untuk proses sosial tersebut. Oleh karena mengemban fungsi penting seperti itu, pendidikan dijadikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) di masyarakat. Di pihak lain, pendidikan juga mempengaruhi perubahan sosial itu sendiri, sehingga antara keduanya terdapat hubungan timbal balik.<sup>27</sup>

Proses pewarisan nilai-nilai atau sosialisasi itu ternyata tidak selalu berjalan dengan mulus, karena sering terjadi pertentangan kepentingan dari berbagai pihak mengenai isi pendidikan, alokasi status dan pemerataan kesempatan pendidikan, peranan dan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat. Perubahan dalam sifat pemerintahan juga akan mempengaruhi pemosisian pendidikan dalam kehidupan masyarakat dan tentunya sistem penyelenggaraan pendidikan. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, pendidikan juga

---

<sup>25</sup> Anwar Shah, *Balances*, p. 20.

<sup>26</sup> Abdul Wahab, dkk., *Masa Depan*, pp. 69-72.

<sup>27</sup> Nanang Rijono, “Partisipasi Masyarakat...”, p. 25.

didesentralisasikan. Yang menjadi persoalan kemudian adalah apakah desentralisasi pendidikan ini dilakukan pada semua daerah kabupaten dan kota—dengan mengabaikan kemampuan riil daerah tersebut khususnya dalam pembiayaan pendidikan.

Para sosiolog sepakat bahwa (sosiologi) pendidikan adalah cabang dari ilmu sosiologi, di mana pusat perhatiannya terletak pada mempelajari struktur dan organisasi pendidikan serta proses sosial yang terjadi dalam institusi atau sistem pendidikan, dan antara sistem pendidikan dengan sistem-sistem kehidupan sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Durkheim, sebagaimana yang dikutip oleh Adiwikarta bahwa pendidikan adalah suatu fakta sosial (*social fact*), dan karenanya menjadi objek studi sosiologi.<sup>28</sup>

Sosiologi pendidikan juga menganalisis pola interaksi antara sekolah dengan kelompok-kelompok sosial lain di masyarakat, antara lain: (1) analisis terhadap struktur kekuasaan di masyarakat beserta imbasnya terhadap persekolahan; (2) analisis terhadap hubungan antara sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat, dan (3) struktur masyarakat beserta pengaruhnya terhadap organisasi sekolah. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek penting yang sekarang telah diakui kepentingannya, seperti tercermin dalam konsep sekolah masyarakat (*the community school*), di mana diinginkan adanya integrasi yang baik antara sekolah dengan kehidupan masyarakat yang dilayaninya.<sup>29</sup>

Menurut Tilaar dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, terdapat lima aliran besar, yaitu:<sup>30</sup>

a. Aliran fungsionalisme

Fungsi pendidikan masa kini adalah transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada. Masa depannya dipersiapkan dengan mengajarkan fungsi-fungsi dalam masyarakat masa depan. Tokoh dalam aliran ini adalah Durkheim dan Parsons.

b. Aliran kulturalisme

Fungsi pendidikan masa kini sebagai upaya merekonstruksi masyarakat; pendidikan berfungsi menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya universal dengan berdasarkan budaya lokal yang berkembang ke arah kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Tokoh dalam aliran ini adalah Brameld dan Ki Hadjar Dewantara.

---

<sup>28</sup> Sudardja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan, Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, (Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, Proyek Pengembangan LPTK, 1988), pp. 11-13.

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*, p. 63.

<sup>30</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), pp. 40-42.

c. Aliran kritikal

Ada dua kelompok aliran kritikal yaitu penganut teori konflik dan teori kritikal. Bagi penganut teori konflik, fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan, untuk mengupayakan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas. Tokohnya adalah Marx dan Bowels. Sedangkan bagi penganut teori kritikal, fungsi pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas dengan mengembangkan keaksaraan kritikal bagi rakyat banyak. Tokohnya adalah Freire, Gyroux dan Vygotsky.

d. Aliran interpretatif

Tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Untuk masa depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elite dan rakyat jelata yang miskin. Tokoh dalam aliran ini adalah Bernstein.

e. Aliran pascamodern

Pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebhinnekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Tokoh dalam aliran ini adalah Derrida, Foucault dan Gramsci.

Menurut Ackerman dan Alscott dalam bukunya "The Stakeholder Society", sebagaimana yang dikutip oleh Tilaar menjelaskan bahwa masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya.<sup>31</sup> Di dalam masyarakat yang demikian yang disebut sebagai *the stakeholders society* adalah orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah nasional (pusat). Masyarakat merupakan pemegang hak, sehingga tujuan lembaga-lembaga pendidikan harus pula menampung apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan bukan hanya menampung apa yang diinginkan oleh birokrasi. Dalam masyarakat yang demikian, proses pendidikan ditentukan oleh para *stakeholders* di dalam masyarakat, yaitu masyarakat, orang tua, peserta didik, negara dan pengelola profesional pendidikan.

Dalam kaitan ini perlu ada lembaga atau struktur organisasi dalam lembaga pendidikan di mana masyarakat ikut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam menanamkan investasi yang berupa SPP, pajak dan sebagainya, tetapi juga ikut-serta dalam merencanakan

---

<sup>31</sup> H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002), pp. 480-481.

kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan serta hal-hal yang menyangkut proses belajar. Semua ini dapat dilakukan melalui manajemen pendidikan berbasis sekolah dan manajemen pendidikan berbasis masyarakat, dan di dalam masyarakat harus ikut-serta dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua aspek manajemennya.<sup>32</sup> Dengan demikian, perubahan manajemen ini dilakukan dengan menggunakan paradigma baru. Selanjutnya Tilaar mengemukakan perbandingan antara paradigma lama dan paradigma baru dari pendidikan nasional Indonesia yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat Indonesia baru, sebagai berikut:<sup>33</sup>

Tabel 3: Perbandingan paradigma lama dan baru pendidikan nasional Indonesia

Indikator Perkembangan Sisdiknas	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Popularisasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendidikan untuk pemutusan mata rantai kemiskinan</li> <li>- Mempercepat terpenuhinya pendidikan dasar untuk semua anak</li> <li>- Merintis pelaksanaan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kecerdasan rakyat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan pelatihan yang bermutu adalah pendidikan yang diperlukan rakyat banyak</li> <li>- Partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan, investasi, evaluasi pendidikan perlu ditingkatkan</li> <li>- Investasi pendidikan melalui sektor pemerintahan ditingkatkan dan dijadikan komitmen publik</li> </ul>
Sistematisasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sistem pendidikan yang baku untuk efisiensi perencanaan dan manajemen,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem pendidikan dititikberatkan kepada pemberdayaan</li> </ul>

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 482.

<sup>33</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru*, pp. 72-80.

	<p>memudahkan supervisi dan peningkatan mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyeragaman pendidikan untuk kesatuan bangsa</li> <li>- Etatisme pendidikan untuk menjaga mutu pendidikan nasional</li> </ul>	<p>lembaga yang diberi otonomi luas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem pendidikan yang terbuka bagi keragaman dalam pelaksanaannya</li> <li>- Program-program nasional hanya pada upaya pengembangan kesatuan bangsa</li> </ul>
Proliferasi pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktis pendidikan terjadi di sekolah dan di luar sekolah</li> <li>- Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan negara</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan penyiapan tenaga trampil oleh sistem pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Delivery system</i> pendidikan semakin kompleks dalam dunia yang terbuka memerlukan kebijakan yang terintegrasi</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan tenaga profesional diorientasikan pada kebutuhan daerah dan pasar tenaga kerja di daerah</li> </ul>
Politisasi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan alat mempertahankan ideologi/kepentingan pemerintah yang berkuasa</li> <li>- Pendidikan nasional yang baik dapat memecahkan masalah sosial budaya</li> <li>- Manajemen pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan nasional ikut serta mendidik manusia sebagai insan politik yang demokratis</li> <li>- Masyarakat, termasuk keluarga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan</li> </ul>

	ditangani oleh birokrasi untuk kesatuan persepsi	
--	--	--

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, masyarakat sebagai agen perubahan (*agent of change*) harus bisa mengarahkan perubahan-perubahan yang terjadi ke arah yang positif sesuai dengan fungsi sosiologik pendidikan. Karena masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi ke generasi selanjutnya secara dinamis sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat, melalui pendidikan dan interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai sosialisasi, seperti anak menyesuaikan diri dengan program belajar di sekolah, menyesuaikan diri dengan norma serta nilai-nilai dalam masyarakat, dan sebagainya.

### E. Kesimpulan

Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi atas beberapa faktor; antara lain perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat secara internal maupun eksternal. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Bila mengacu pada “pendidikan sepanjang hayat” atau *life long education*, maka menjadi lebih jelas bahwa pendidikan dapat terjadi kapan pun dan di mana pun, oleh siapa pun dan kepada siapa pun. Sehingga setiap orang harus belajar dari pengalaman di lingkungan sosialnya, dengan menguasai sejumlah ketrampilan yang bermanfaat untuk merespons kebutuhan hidupnya.



### Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, Fadillah Putra dan Saiful Arif, *Masa Depan Otonomi Daerah, Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah*, Surabaya: Penerbit SIC, 2002.
- Adiwikarta, Sudardja, *Sosiologi Pendidikan, Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*, Jakarta: Depdikbud, Ditjen Dikti, Proyek Pengembangan LPTK, 1988.
- Agrawal, Arun and Jesse Ribot, *Accountability in Decentralization, A Framework with South Asian and West African Cases*, Yale University: Departemen of Political Science, 2000.
- Bogason, Peter, *Public Policy and Local Governance, Institution in Postmodern Society*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2001.
- Faisal, Sanapiah, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.t.
- Freeman, Andrew R., *The Network Nation —The Relevance of This For Possible Education and General Administrative Structure and Strategies in the 1980s— And 90s, Master of Education Minor Thesis*, University of Melbourne, 1983, [afreeman@pcug.org.au](mailto:afreeman@pcug.org.au), updated 28 August 1996.
- Gunawan, Ary H., *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t.
- Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Rijono, Nanang, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan; Kajian Fenomenologis Makna Partisipasi Bagi Masyarakat Etnis Kutai di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara”, Malang: Unmer, 2003.
- Robison, Philip, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, alih bahasa Hasan Basari, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soeprapto, H.R. Riyadi, *Interaksionisme Simbolik, Perspektif Sosiologi Modern*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar dan Averoes Press Malang, 2001.
- Shah, Anwar, *Balances, Accountability and Responsiveness: Lessons about Decentralization*, Washington D.C., USA: World Bank, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Seri Pengenalan Sosiologi 4, Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- Soelaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002.